RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

bangga melayani bangsa

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 2
DAFTAR GAMBAR ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum4
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan 7
1.4 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II 9
EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG TRIWULAN II 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Hingga Triwulan II 9
BAB III 17
RENCANA KERA DAN PENDANAAN 17
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 17
KABUPATEN TABALONG 17
BAB V 24
PENUTUP 24

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024 9

Table 2.2 Rekapitulafi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 (Triwulan II) 11

Tabel 3.1 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun Renja Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2024 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban, serta penegakan kebijakan dan peraturan

daerah terjamin dan jelas aturan lainnya, karena adanya payung hukum yang mendasarinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo7r 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Permendari Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan PRPJD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 – 2034.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Paraja Kabupaten Tabalong.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor ..... Tahun 2021
27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
28. Peraturan Bupati Tabalong Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024
29. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong;
2. Keadaan yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan kegiatan target kinerja dan pagu kegiatan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk penyempurnaan Rencana Kerja untuk menyesuaikan perubahan target terhadap program dan kegiatan dan menyesuaikan perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong;
2. Sebagai acauan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD Hingga Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Hingga Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table 2.1 Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegaiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kinerja		Realisasi		%
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**BB**	**-**	**11.184.597.822**	**4.166.406.069**	
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**50%**	**75.478.460**	**21.628.900**	
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	7 Laporan	75.478.460	21.628.900	
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**48%**	**7.865.302.000**	**3.476.565.657**	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	38 Orang	7.865.302.000	3.476.565.657	
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**35%**	**136.041.000**	**32.260.600**	
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	8.050.000	0	
	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	5 Orang	127.991.000	32.260.600	
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**39%**	**1.009.428.794**	**351.440.984**	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	4 Paket	252.455.182	37.776.500	
	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	78.139.263	26.656.000	
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	53.120.349	13.500.000	
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000	2.000.000	
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	15 Laporan	618.314.000	271.508.484	
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**43%**	**854.679.800**	**83.658.728**	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik dan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	6 Laporan	89.400.000	37.568.728	
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	121 Laporan	51 Laporan	765.279.800	46.090.000	
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**100%**	**20%**	**1.243.667.768**	**200.851.200**	
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	0 Unit	467.740.000	187.365.200	

	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	8 Unit	28.470.000	5.035.000	
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	747.457.768	8.451.000	
	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentasi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**53%**	**5.134.012.339**	**541.584.222**	
			Persentasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati / WaliKota	**100%**	**45%**			
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penangganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**	**100%**	**53%**	**4.540.433.423**	**382.492.458**	
	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	51 Kasus	35 Kasus	1.841.344.000	155.105.740	
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	2 Dokumen	2.305.040.875	48.197.462	
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	50 Orang	178.779.948	61.023.823	
	1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahaan Kejahatan	160 Dokumen	33 Dokumen	215.268.600	118.165.433	
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**100%**	**45%**	**1.841.344.000**	**159.091.764**	
	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/wali kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	28 Laporan	10 Laporan	167.942.738	18.218.600	
	1.05.02.2.01.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	20 Laporan	18 Laporan	220.099.800	74.252.000	
	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	50 Laporan	12 Laporan	205.536.378	66.621.164	
	1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Pencegahan Penanggulan gan Kebakaran**	**100%**	**60%**	**3.918.913.714**	**402.087.594**	
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran	**6 Unit**	**1 Unit**			
	1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**13%**	**3.918.913.714**	**402.087.594**	
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten,Kota Setiap Tahunnya	40 Dokumen	24 Dokumen	889.768.320	392.583.089	
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 Unit	1 Unit	3.029.145.394	9.504.505	

Table 2.2 Rekapitulafi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 (Triwulan II)

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Nilai)	4,00	-	4,00	-	4	10.214.182.178		1.051.660.864		3.215.545.205		-		-	4	4.267.206.069	100,00%	41,78%	4,00	4.267.206.069		0,00%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)		-	0,00	-	100	37.836.089	-	-	-	21.628.900		-		-	-	21.628.900	0,00%	57,16%	0,00	21.628.900	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		-	0,00	-	11	37.836.089	5	-	2	21.628.900					7	21.628.900	63,64%	57,16%	7,00	21.628.900	0,00%	0,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (persen)		-	0,00	-	100	7.454.244.000	-	857.026.285	-	2.619.539.372		-		-	-	3.476.565.657	0,00%	46,64%	0,00	3.476.565.657	0,00%	0,00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	40	7.454.244.000	38	857.026.285	38	2.619.539.372					38	3.476.565.657	95,00%	46,64%	38,00	3.476.565.657	0,00%	0,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)		-	0,00	-	100	113.965.000	-	12.544.600	-	19.716.000		-		-	-	32.260.600	0,00%	28,31%	0,00	32.260.600	0,00%	0,00%

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	1	1.550.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		-	0,00	-	8	112.415.000	3	12.544.600	2	19.716.000					5	32.260.600	62,50%	28,70%	5,00	32.260.600	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (persen)		-	0,00	-	100	1.023.099.194	-	65.423.587	-	286.017.397		-		-	-	351.440.984	0,00%	34,35%	0,00	351.440.984	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	17	218.490.634	-	-	10	37.776.500					10	37.776.500	58,82%	17,29%	10,00	37.776.500	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	3	78.139.263	1	-	-	26.656.000					1	26.656.000	33,33%	34,11%	1,00	26.656.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	97.692.297	1	-	-	13.500.000					1	13.500.000	25,00%	13,82%	1,00	13.500.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		-	0,00	-	2	7.400.000	-	-	-	2.000.000					-	2.000.000	0,00%	27,03%	0,00	2.000.000	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	23	621.377.000	9	65.423.587	-	206.084.897					9	271.508.484	39,13%	43,69%	9,00	271.508.484	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)		-	0,00	-	100	816.099.800	-	52.484.392	-	131.974.336		-		-	-	184.458.728	0,00%	22,60%	0,00	184.458.728	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	15	89.400.000	3	18.884.392	3	18.684.336					6	37.568.728	40,00%	42,02%	6,00	37.568.728	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	121	726.699.800	21	33.600.000	30	113.290.000					51	146.890.000	42,15%	20,21%	51,00	146.890.000	0,00%	0,00%

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)		-	0,00	-	100	768.938.095	-	64.182.000	-	136.669.200		-		-	-	200.851.200	0,00%	26,12%	0,00	200.851.200	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	22	467.740.000	22	64.182.000	22	123.183.200					11	187.365.200	50,00%	40,06%	11,00	187.365.200	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	36	28.470.000	6	-	2	5.035.000					8	5.035.000	22,22%	17,69%	8,00	5.035.000	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	2	272.728.095	-	-	-	8.451.000					-	8.451.000	0,00%	3,10%	0,00	8.451.000	0,00%	0,00%
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		80,09%	41,78%				
																		Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																							
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Wali Kota (Persentase)	100,00		0,00		100										-		0,00%		100,00			
			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman danKetertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan) (Persentase)	100,00	-	0,00	-	100	5.033.490.833		988.648.430		905.395.792		-		-	-	1.894.044.222	0,00%	37,63%	100,00	1.894.044.222		0,00%
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian K3 ((Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan) (Persen)		-	0,00	-	100	4.440.680.973	-	988.648.430	-	746.304.028		-		-	-	1.734.952.458	0,00%	39,07%	0,00	1.734.952.458	0,00%	0,00%
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		-	0,00	-	5	2.305.040.875	1	750.688.430	1	83.917.310					2	834.605.740	40,00%	36,21%	2,00	834.605.740	0,00%	0,00%

		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		-	0,00	-	60	168.876.298	-	-	50	48.197.462					50	48.197.462	83,33 %	28,54 %	50,00	48.197.462	0,00%	0,00%
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)		-	0,00	-	160	228.383.800	20	12.960.000	13	48.063.823					33	61.023.823	20,63 %	26,72 %	33,00	61.023.823	0,00%	0,00%
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)		-	0,00	-	51	1.738.380.000	12	225.000.000	23	566.125.433					35	791.125.433	68,63 %	45,51 %	35,00	791.125.433	0,00%	0,00%
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda (persen)		-	0,00	-	100	592.809.860	-	-	-	159.091.764		-		-	-	159.091.764	0,00%	26,84 %	0,00	159.091.764	0,00%	0,00%
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		-	0,00	-	20	165.280.956	-	-	-	18.218.600					-	18.218.600	0,00%	11,02 %	0,00	18.218.600	0,00%	0,00%
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)		-	0,00	-	50	220.296.948	-	-	-	74.252.000					-	74.252.000	0,00%	33,71 %	0,00	74.252.000	0,00%	0,00%
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		-	0,00	-	20	207.231.956	-	-	-	66.621.164					-	66.621.164	0,00%	32,15 %	0,00	66.621.164	0,00%	0,00%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									45,75 %	37,63 %				

																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan penangulangan kebakaran (%)	100,00	-	0,00	-	100	3.909.163.714		140.280.394		261.807.200		-		-	-	402.087.594	0,00%	10,29 %	100,00	402.087.594		0,00%
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran (nilai)	5,00		0,00		5									-	0,00%		5,00			
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)		-	0,00	-	100	3.909.163.714	-	140.280.394	-	261.807.200		-		-	-	402.087.594	0,00%	10,29 %	0,00	402.087.594	0,00%	0,00%
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)		-	0,00	-	40	880.018.320	10	130.775.889	14	261.807.200					24	392.583.089	60,00 %	44,61 %	24,00	392.583.089	0,00%	0,00%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)		-	0,00	-	6	3.029.145.394	1	9.504.505	-	-					1	9.504.505	16,67 %	0,31%	1,00	9.504.505	0,00%	0,00%
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		26,42 %	10,29 %				
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
								19.156.836.725		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**											**60,11 %**	**34,26 %**				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												**Rendah**	**Sangat Rendah**				

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):

BAB III

RENCANA KERA DAN PENDANAAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN TABALONG

Dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024, ada beberapa kegiatan dan ada juga yang mengalami perubahan dari segi target dan anggaran, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator program ini adalah : Nilai AKIP dengan target “BB”
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari pagu awal Rp 37.836.089,- pagu perubahan Rp 75.478.460,-
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari pagu 7.454.244.000,- pagu perubahan Rp 7.865.302.000,-
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari pagu awal Rp 113.965.000,- pagu perubahan Rp 136.041.000,-
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah pagu awal Rp 1.023.099.194,- pagu perubahan Rp 1.009.428.794,-
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu awal Rp 816.099.800,- pagu perubahan Rp 854.679.800,-
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu awal Rp 768.938.095,- pagu perubahan Rp 1.243.667.768
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, indikator program ini adalah : Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan) dengan target 100% sedangkan kegiatannya meliputi :
   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu awal Rp 4.440.680.973,- pagu perubahan Rp 4.540.433.423,-

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota pagu awal Rp 592.809.860,- pagu perubahan Rp 593.578.916,-

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, indikator program ini adalah : Persentase Cakupan Pencegahan Dini dengan target 100% sedangkan kegiatannya meliputi :
   a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota pagu awal Rp 3.909.163.714,- pagu perubahan RP 3.918.913.714

Tabel 3.1 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TABALONG**	**Nilai AKIP**	**BB**	**6.509.898.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TABALONG**	**Nilai AKIP**	**BB**	**6.939.080.651**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 Laporan**	**33.000.500**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 Laporan**	**37.836.089**	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	33.000.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	37.836.089	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN**	**40 Orang/ Bulan**	**4.758.178.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN**	**40 Orang/ Bulan**	**6.804.186.035**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TABALONG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	4.758.178.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TABALONG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	6.804.186.035	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**2 Paket**	**35.072.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**2 Paket**	**113.965.000**	
3.1	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	TABALONG	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.860.000	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	TABALONG	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Orang	1.550.000	

3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	TABALONG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	33.212.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	TABALONG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	112.415.000	Diklat Luar Provinsi
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Paket**	**484.155.468**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Paket**	**832.251.487**	
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TABALONG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	178.305.646	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TABALONG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	244.306.8760	penambahan untuk instalasi listrik kantor dan peralatan dan perlengkapan pendukung administrasi kantor
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TABALONG	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	26.908.779	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TABALONG	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	28.941.074	
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TABALONG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	37.934.315	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TABALONG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	63.030.537	
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	TABALONG	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.090.928	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	TABALONG	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.900.000	
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	235.915.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**23 Laporan**	491.073.000	Perjalanan dinas HUT Satpol PP Provinsi dan Nasional, Perjalanan Dinas HUT Damkar Provinsi dan Nasional
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**TABALONG**	**Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**136 Laporan**	**628.150.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**TABALONG**	**Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**136 Laporan**	**796.625.000**	
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TABALONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	106.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TABALONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	89.400.000	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TABALONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	121 Laporan	521.350.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TABALONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	121 Laporan	707.225.000	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**TABALONG**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60 Unit**	**571.342.032**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**TABALONG**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60 Unit**	**768.938.095**	

6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TABALONG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	357.488.316	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TABALONG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	467.740.000	Penambahan biaya pemeliharaan STNK R4 sebanyak menjadi 7 unit dan BBM kendaraan operasional
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TABALONG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	16.755.348	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TABALONG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	28.470.000	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TABALONG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	197.098.368	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TABALONG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	272.728.095	Rehab Lobby kantor dan parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 dan 6
II	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**TABALONG**	**Persentasi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Persentasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan bupati / Wal iKota**	**100%**	**2.468.897.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**TABALONG**	**Persentasi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Persentasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan bupati / Wal iKota**	**100%**	**5.229.097.200**	
1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**TABALONG**	**Persentase Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan)**	**4 Paket**	**1.996.150.000**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**TABALONG**	**Persentase Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan)**	**4 Paket**	**4.631.961.134**	
1.1	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	TABALONG	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	51 Kasus	1.615.500.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	TABALONG	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	51 Kasus	1.736.815.794	1. Penambahan Jumlah Kali Kegiatan 2. Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan 3. SPPD Keluar Daerah Dalam Provinsi Ke Banjarbaru (Untuk Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Satpol PP Provinsi)
1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	TABALONG	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	127.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	TABALONG	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	2.568.662.340	1. Untuk PAM Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2. Untuk Pemilihan Umun Bupati dan Wakil Bupati 3. Untuk PAM Gabungan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 4. PAM Apel Gelar Pasukan :
1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam	TABALONG	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang	60 Orang	125.650.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	TABALONG	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang	60 Orang	138.885.000	Untuk memenuhi Kebutuhan SDM PPNS di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tabalong

	Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Ditingkatkan Kapasitasnya			termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Ditingkatkan Kapasitasnya			
1.4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	TABALONG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	160 Dokumen	128.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	TABALONG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	160 Dokumen	187.598.000	Melakukan Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Provinsi) Dikarenakan Banyak Melakukan Kegiatan Pengawalan dan Pengamanan Bupati Tabalong, Wakil Bupati Tabalong dan Pejabat Pemerintah Keluar Daerah untuk Menghadiri atau Mengikuti Agenda Tahunan dan Acara Tahunan Ke Kabupaten Lain serta Melakukan Penambahan Uang Petugas Pengawalan Jemaah Haji.
2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**TABALONG**	**Persentase penegakan Perda**	**90 Laporan**	**472.747.000**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**TABALONG**	**Persentase penegakan Perda**	**90 Laporan**	**597.162.509**	
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	66.911.893	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	166.040.002	1. Penambahan Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, 2. Penambahan Belanja Bahan Cetak (Jumlah Kali Kegiatan Sosialisasi Bertambah), 3. Penambahan Belanja Makan dan Minum Rapat (Jumlah Orang dan Jumlah Kali Kegiatan Sosialisasi Bertambah), 4. Penambahan Honorarium Narasumber/Pembahas (Jumlah Kali Kegiatan Sosialisasi Bertambah), 5. Penambahan Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Perda/Perkada (Tambah 1 Kali Tayang), 6. Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penambahan Jumlah Personil dan Tujuan Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Murung Pudak, Tanta, Muara Harus, Bintang Ara, Haruai, Pugaan, Upau, dan Muara Uya)

2.2	Pengawasan Aatas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	183.170.984	Pengawasan Aatas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	208.458.384	Penambahan Anggaran untuk Perjalanan Dinas Ke Balikpapan dan Tamiang Layang dalam rangka Koordinasi dan Kerjasama dalam Pelaksanaan Perda / Perkada Lintas Provinsi
2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	50 Laporan	222.664.123	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	50 Laporan	222.637.680	
III	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**TABALONG**	**Cakupan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan kebakaran**		**922.838.000**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**TABALONG**	**Cakupan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan kebakaran**		**3.908.155.054**	
1	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**TABALONG**	**Persentase Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Paket**	**922.838.000**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**TABALONG**	**Persentase Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Paket**	**3.908.155.054**	
1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	TABALONG	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten,Kota Setiap Tahunnya	40 Dokumen	854.293.730	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	TABALONG	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten,Kota Setiap Tahunnya	40 Dokumen	895.079.660	Penambahan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas Ke Jakarta, Dalam Rangka Menghadiri HUT Damkar di Jakarta dan Pendukung Kegiatan
1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	TABALONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 Unit	68.544.270	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Ala Pelindung Diri	TABALONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 Unit	3.013.075.394	Usulan Musrenbang Kecamatan
JUMLAH					**9.901.633.000**					**15.546.372.810**	

BAB V
PENUTUP

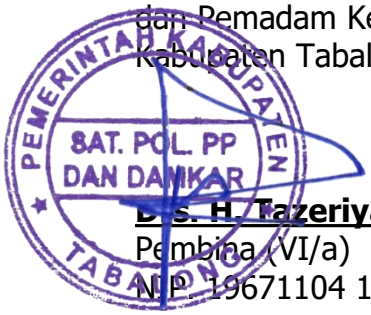
Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong. Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. Tazeriyanor, MA
Pembina (VI/a)
NIP. 19671104 198903 1 011